

Multikulturalisme pada Teknologi Internet dan Kekuasaan Global

Evi Novianti^{1,2*}, Annisa Luthfiyyah², Shandra R. Panji Wulung¹

¹Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran

Jl. Dipatiukur No.35, Bandung 40132 - Indonesia

²Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang, Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363 – Indonesia

*Email Korespondensi: evi.novianti@unpad.ac.id

Abstract - The phenomenon of multicultural communication as a fact and social phenomenon, with the development of communication networks and aviation, humans are increasingly facilitated in conducting communication directly in places far away. National policies are needed to counteract the effects of multiculturalism communication and at the same time maintain conducive international relations by intelligently dealing with foreign interference and accomplices within the country. The purpose of this study is to identify multiculturalism communication on the issue of global communication and its impact on power, the urgency of media policies, new global information and communication systems. This research approach is qualitative which aims to obtain holistic results regarding the phenomena that are currently happening. Obtaining primary data through interviews, while secondary data obtained through several previous studies. The analytical method in this study uses descriptive qualitative based on data obtained. Information governance policies needed to regulate freedom of information and privacy rights with national security are not easily resolved. The government should uphold cultural values but practice behavior that is not in harmony and even reverse cultural values that are respected by the public.

Keywords: *Global Power, Internet Technology, Multiculturalism*

Abstrak - Fenomena komunikasi multikulturalisme sebagai fakta dan fenomena sosial, dengan berkembangnya jaringan komunikasi dan penerbangan, manusia semakin dimudahkan dalam melakukan komunikasi secara langsung di tempat yang jaraknya jauh. Kebijakan nasional diperlukan untuk menangkal dampak komunikasi multikulturalisme dan pada waktu yang sama memelihara hubungan internasional yang kondusif dengan menyiasati secara cerdas campur tangan asing dan kaki tangannya di dalam negara. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi komunikasi multikulturalisme pada persoalan komunikasi global dan dampak pada kekuasaan, urgensi kebijakan media, informasi global baru dan tata komunikasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang holistik mengenai fenomena yang sedang terjadi saat ini. Perolehan data primer melalui wawancara, sementara data sekunder didapatkan melalui beberapa kajian terdahulu. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Kebijakan tata informasi diperlukan untuk mengatur kebebasan informasi dan hak-hak privasi dengan keamanan nasional merupakan hal yang tak mudah diselesaikan. Pemerintah seharusnya menjunjung nilai budaya namun mempraktikan perilaku yang tak selaras dan bahkan membalikkan nilai-nilai budaya yang dihargai masyarakat.

Kata kunci: *Multikulturalisme, Teknologi Internet, Kekuasaan Global*

Pendahuluan

Kepadaian manusia saat ini dalam berkomunikasi merupakan kunci untuk membuka pintu keberhasilan dalam membangun hubungan sosial. Apalagi dengan

kehadiran teknologi komunikasi yang semakin berkembang manusia dimudahkan dalam berkomunikasi menggunakan akses internet agar manusia dapat berkomunikasi dari latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya,

suku bangsa maupun ideologi yang berbeda-beda.

Teknologi komunikasi dan informasi yang telah berkembang dan memberikan perubahan dalam infrastruktur politik, ekonomi baik pada tingkat domestik maupun global.

Penguasaan atas pengendalian teknologi komunikasi oleh pihak tertentu telah mempengaruhi kondisi keamanan nasional, seperti kemunculan teroris, perang antar saudara, separatisme, sistem senjata baru, gerakan kolektif intelijen dan kontra intelijen serta diseminasi informasi dengan segala implikasi dan konsekuensinya.

Komunikasi global telah mengubah definisi terhadap kekuasaan pada panggung politik dunia dengan cara yang tidak mempertimbangkan teori hubungan internasional secara tradisional.

Komunikasi global telah menimbulkan perubahan yang signifikan pada arena besar kekuasaan yang keras dan kekuasaan lunak. Dalam kekuasaan keras perubahan yang terjadi yaitu kekuatan material seperti perlombaan militer dan persaingan ekonomi.

Sedangkan kekuasaan lunak, perubahan terjadi pada kekuatan secara simbolis yaitu meningkatnya kampanye ideologi serta resistensi budaya dan moral.

Fenomena komunikasi multikulturalisme sebagai fakta dan fenomena sosial. Pada dua dekade terakhir ini terjadi peningkatan interaksi sosial di berbagai belahan dunia. Fenomena ini terjadi didukung oleh kemajuan pesat pada bidang inovasi teknologi, khususnya telekomunikasi dan transportasi, Tubbs (1996: 239).

Dengan berkembangnya jaringan komunikasi dan penerbangan, manusia semakin dimudahkan dalam melakukan komunikasi secara langsung di tempat yang jaraknya jauh. Manusia yang memiliki identitas sosial yang beragam biasanya melakukan komunikasi dengan konteks pariwisata, perdagangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi serta transportasi.

Tanpa disadari ketika kita melakukan komunikasi multikulturalisme yang melibatkan manusia-manusia didalamnya dari beberapa belahan dunia yang memiliki perbedaan bahasa, adat istiadat, pola pikir dan etika.

Perbedaan antara manusia yang melakukan komunikasi tidak hanya perihal

nilai-nilai budaya tetapi terdapat aspek-aspek ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan politik.

Kemajuan dunia tidak menjadikan perbedaan budaya menjadi halangan bagi satu dengan yang lainnya dalam menjalin hubungan melalui komunikasi multikulturalisme yang dapat mengantarkan mereka untuk dapat lebih saling memberikan toleransi, memahami satu sama lain, dan beradaptasi.

Kunci keberhasilan dalam komunikasi multikulturalisme tidak adanya aturan maupun konvensi yang membatasi, tetapi berjalan menurut norma dan nilai budaya masing-masing. Multikulturalisme sebagai ladang untuk mengetahui dan mempelajari dengan bijak budaya lain.

Perbedaan budaya merupakan pemberian Tuhan yang bertujuan agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain. Dapat memberikan pemahaman bahwa manusia perlu menjalin komunikasi meskipun dengan manusia yang memiliki perbedaan suku dan bangsa agar manusia dapat saling mengenal dan membangun hubungan.

Kerangka Teori

Komunikasi multikulturalisme menuntut semua individu untuk dapat saling menyadari dan memahami akan beragam budaya, dengan begitu manusia dapat saling berbagi, melengkapi dan saling menjaga untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berdampingan agar terwujudnya susana damai.

Salah satu prinsip dalam komunikasi multikulturalisme yang berlaku bahwa pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk dapat mengidentifikasi dan memahami nilai dari budaya lain.

Kemampuan dalam membangun komunikasi multikulturalisme menjadi penting untuk dapat melengkapi diri dengan kemampuan komunikasi multikulturalisme dan hal itu seharusnya tidak dilakukan sekedar untuk tujuan pergaulan namun juga memiliki tujuan yang bersifat kognitif dan afektif.

Menurut Litvin (dalam Mulyana, ed, 2001: xi) berbagai tujuan tersebut meliputi: (1) melatih kepekaan pada diri sendiri secara budaya; (2) mendorong pemahaman yang besar terhadap budaya sendiri maupun budaya lain; (3) memahami cara untuk memperoleh pandangan kepada budaya sendiri atas asumsi, nilai-nilai, kebebasan dan keterbatasannya; (4) mempelajari bagaimana berkomunikasi yang

lebih baik agar komunikasi mampu menerima gaya dan isi dari pesan; (5) mencapai kapasitas untuk dapat terlibat dengan anggota dari budaya lain agar terciptanya hubungan yang memuaskan dan awet; (6) memahami konsep, model dan implementasi dalam bidang komunikasi multikulturalisme; dan (7) menyadari bahwa sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari dengan sistematis, dengan cara dibandingkan dan dipahami.

Semakin terbukanya dunia akibat globalisasi semakin ramai pula komunikasi multikulturalisme yang melibatkan manusia dari berbagai budaya yang tentu berbeda dengan menampilkan fenomena dalam hubungan. Dengan hal ini mendorong peningkatan hubungan sosial dan komunikasi multikulturalisme.

Dalam tulisan ini penulis membahas komunikasi multikulturalisme pada persoalan komunikasi global dan dampak pada kekuasaan, urgensi kebijakan media, informasi global baru dan tata komunikasi

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil holistik mengenai fenomena yang sedang terjadi saat ini. Perolehan data primer melalui wawancara, sementara data sekunder didapatkan melalui beberapa kajian terdahulu.

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil Penelitian

Komunikasi merupakan sistem saraf pada organisasi, Daniel Lerner (1982). Ketika manusia melakukan komunikasi disitulah pertukaran informasi muncul. Pertukaran informasi adalah mekanisme pengaturan tindakan sosial, bahkan komunikasi dapat membentuk organisasi apabila diterapkan dalam perilaku kolektif pada lembaga sosial baik besar maupun kecil, meskipun berawal tidak formal, sejajar dan berjenjang.

Kemampuan manusia dalam berkomunikasi dapat menentukan efektivitas dan batasan dari setiap organisasi dalam melakukan aktivitas dengan lingkungannya. Sistem informasi internasional didalamnya terkandung komunikasi multikulturalisme dari

berbagai belahan dunia. Dengan pergerakan yang cepat, sistem ini mampu mengirim informasi ke mana pun dalam waktu yang singkat, didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berjarak antara komunikator dengan komunikasi tidak menjadi persoalan saat ini. Dampak dari mudahnya akses untuk berkomunikasi dan bertukar informasi mengakibatkan komunikasi internasional yang berkembang menuntut kemampuan setiap bangsa dan negara untuk dapat mengkoordinasikannya.

Dalam catatan sejarah, perkembangan yang diakibatkan dari kemajuan teknologi komunikasi memperlihatkan perkembangan signifikan dalam perubahan sosial di masyarakat. Pertumbuhan suatu bangsa di benua Amerika tidak dapat berjalan pada abad 19 apabila tidak ada telegraf dan pembangunan jalan kereta api, karena dua hal tersebut telah menjembatani wilayah pedalaman dan pesisir yang luas. Pada abad 21 komunikasi didukung kemajuan teknologi internet dan pesawat. Teknologi internet pada abad ini sebagai media yang vital karena mampu memberikan informasi dari berbagai sumber tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Pada umumnya Negara Afrika merupakan negara yang miskin dan kekurangan dalam hal komunikasi modern, namun saat ini sudah mulai mengembangkan kemampuan komunikasi. Hal tersebut diakibatkan oleh berkembangnya pesawat dan telekomunikasi antar negara sehingga Afrika mampu mempererat dan memperluas hubungan. Kemampuan Afrika dalam mengatur komunikasi diakibatkan oleh pemimpin Afrika yang dengan tegas menyerah pengaruh negara-negara Eropa di benua mereka.

Pengaruh dari ‘kaum kolonis baru’, seperti Air France, British Airways, Intelsat, Reuters, Le Monde, AFP, Newsweek, BBC memungkinkan telah terjadinya interaksi dan kerja sama di antara mereka sehingga mengakibatkan terbentuknya Organisasi Kesatuan Afrika dan perlawanannya terhadap kolonialis baru. Selanjutnya kebijakan dan kegiatan dari Afrika ditunjukan dengan mengakhiri kekuasaan kulit putih di Afrika Selatan tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran

teknologi komunikasi dan transportasi jarak jauh beserta peran dari media massa internasional.

Sedangkan di benua Asia akibat dari kemajuan teknologi komunikasi, terdapat perubahan dalam berbagai bidang. Sejumlah negara di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, India dan Singapura meningkatkan pembangunan ekonomi. Perubahan politik yang terjadi di dunia juga dapat menyebar dengan cepat akibat teknologi informasi. Dalam dunia Islam terdapat persoalan mengenai masalah Israel-Palestina serta peran dan kepedulian negara Islam yang masih lemah terhadap perkembangan teknologi.

Kurangnya dunia Islam dari komunikasi multikulturalisme berpotensi untuk membuka pintu masuk bagi intervensi pihak ketiga yang di satu sisi dapat mengambil keuntungan sepahak, dan di sisi lain merugikan dunia Islam. Para ahli komunikasi internasional di dunia Islam mengalami kemajuan yang relatif signifikan secara diametrikal seiring dengan perubahan dalam kesejahteraan ekonomi.

Secara politik, komunikasi multikulturalisme dimudahkan untuk dapat mendorong wilayah tradisional dan kedaulatan pada suatu bangsa; secara ekonomi melemahkan kekuatan ekonomi dan mengambil sumber-sumber ekonomi suatu bangsa; serta budaya memberikan pengaruh yang kontras terhadap nilai dan norma budaya tradisional. Tentu tidak dapat dipungkiri pola komunikasi multikulturalisme telah menciptakan budaya materialisme dan konsumerisme baru, seperti penjajahan Coca-Cola, KFC, McDonald's dan komersialisasi tubuh yang didukung oleh industri hiburan secara global.

Pada arena budaya, dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan budaya pop, tetapi juga gaya hidup materialistik dan modis yang tidak mengindahkan nilai-nilai budaya lokal. Saluran dalam komunikasi multikulturalisme lebih menampilkan diri sebagai arena pertunjukan batas-batas politik ekonomi dan budaya baru yang menantang sistem politik ekonomi dan budaya tradisional.

Menurut Majid Tehranian (2003), taksonomi komunikasi dan informasi global

dapat mensinyalir sejumlah kebijakan yang saat ini bekerja pada lingkungan masyarakat global. Sebagaimana gambaran di atas dapat diketahui bahwa penetrasi budaya global telah memasuki wilayah informasi dan budaya sedemikian jauh dan dalam sehingga perlu antisipasi dengan politik kebijakan pada bidang informasi maupun budaya.

Dalam wilayah informasi, aspek-aspek yang perlu diatur dengan kebijakan yang melingkupi masalah keamanan nasional, kebebasan kelompok dan individu, privacy, pornografi dan pornoaksi serta hak terbit copyright. Pada bagian budaya, aspek-aspek warisan sejarah, identitas budaya, tujuan pewarisan budaya, agama dan bahasa telah teridentifikasi. Di antara dua kebijakan tersebut terbuka ruang publik untuk berwacana guna membentuk opini publik dan kehendak demokratis. Semua kebijakan ini dibuat untuk menghindari potensi pecahnya konflik budaya ketika benturan budaya tidak saling pengertian dan merusak kearifan serta menjurus pada arah dominasi budaya.

Dalam menjamin keamanan dan perdamaian dunia atas dasar prinsip keadilan sosial, hubungan internasional tentu membutuhkan dialog multikulturalisme yang luas untuk membangun jembatan komunikasi bagi konstruksi budaya yang harmonis dan ideal. Untuk menghindari konflik, dialog multikulturalisme harus dapat menyentuh arena militer, diplomasi, ekonomi serta budaya.

Dampak pada arena militer keunggulan teknologi komunikasi seperti pedang bermata dua yang mengarah pada paradoks "besar adalah kecil" yang artinya semakin banyak keamanan maka semakin kecil keamanan. Seperti penguasaan senjata nuklir yang menjadi kekuatan penangkal paling besar menciptakan kemungkinan yang lebih besar dalam perang nuklir baik disengaja maupun tidak di masa depan. Sistem pertahanan global dengan dukungan kendali satelit jarak jauh yang dikuasi oleh negara super power, namun keuntungannya membuka peluang untuk dimanfaatkan secara rugi oleh mereka yang mampu membeli jasa satelit.

Terkait gagasan mengenai penggudangan senjata penghancur massal yang

mendapat prioritas keamanan sangat tinggi bagi mereka pemiliknya. Hal tersebut sangat problematik karena teknologi militer meningkatkan rasio pukul serta bunuh, dan teknologi komunikasi pun telah meningkatkan kekuatannya untuk tujuan pertahanan. Akibatnya kondisi ketidakamanan permanen berlaku di pusat-pusat dan pinggiran kekuasaan global. Implikasi politik dari fenomena ini, pemilikan kekuasaan dan penjagaan perdamaian sudah berkembang sedemikian jauh namun dipandang dari tinjauan ruang desa global, hal itu tentu sulit untuk dapat dipertahankan.

Dampak pada arena diplomasi, diplomasi internasional didukung oleh diplomasi publik antarpemerintah. Komunikasi multikulturalisme juga menggerakan 3 jenis diplomasi baru yang disebut diplomasi publik., diplomasi masyarakat dan diplomasi virtual. Diplomasi publik yang menggunakan jaringan media massa dimanfaatkan pemerintah sehingga memiliki arti yang mendukung politik luar negeri.

Terlihat antara pemerintah dan media massa memiliki hubungan simbiosis dalam liputan isu internasional. Pemerintah dapat membuka akses serta membatasi dan memanipulasi informasi melalui media massa, sedangkan pada media massa dapat memainkan peran ganda dalam pembentukan politik luar negeri. Media massa komersial bersedia untuk mendikotomi, mendramatisasi dan mendemonisasikan liputannya.

Hal ini berlawanan dengan diplomasi publik yang secara esensial top down, diplomasi masyarakat merupakan diplomasi bottom-up. Pada diplomasi ini, warna negara biasanya melibatkan diri dalam sebuah manuver diplomasi yang dirancang oleh departemen luar negeri. Dalam memecahkan konflik internasional, suara masyarakat diperlukan oleh pemerintah. Begitu juga lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap isu internasional dapat melancarkan diplomasi masyarakat. Diplomasi jenis ini dimanfaatkan untuk menyampaikan koreksi kepada pemerintah atau tujuan-tujuan nasional yang dipandang sempit oleh masyarakat. Diplomasi virtual merupakan

fenomena yang mutakhir karena mampu menampilkan elekonferensi dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi. Diplomasi virtual membuka forum diskusi tentang berbagai isu mutakhir dan memberi saluran bagi pembentukan opini.

Dampak pada arena ekonomi, komunikasi multikulturalisme pada ekonomi telah mengubah proses produksi dan distribusi pengembangan perdagangan dan jasa keuangan. Perusahaan transnasional mendesentralisasi jaringan produksi dan distribusi karena jaringan internet dapat membantu arus data melampaui batas-batas negara. Dapat disimpulkan bahwa internet telah menjadi alat penting dalam kegiatan transfer industri, transfer pekerjaan dari wilayah yang berbiaya tinggi ke wilayah yang berbiaya rendah, baik di dalam maupun di antara bangsa-bangsa.

Namun dari sisi lain, hal ini menyimpan dilema politik baru berupa pertentangan atau perdebatan, seperti mengenai isu keamanan nasional versus kebebasan ekonomi serta isu tentang proteksionisme versus internasionalisme dalam perdagangan dll.

Dampak pada arena budaya merupakan fenomena yang mudah untuk diamati. Fenomena ini seperti misalnya demam konser k-pop menjadi fenomena budaya di beberapa belahan dunia. Komunikasi multikulturalisme memberi dampak terhadap interaksi budaya adalah laga pertandingan olahraga bergengsi tingkat dunia. Peristiwa tersebut dapat menjadi pencitraan budaya, baik menggunakan atau tidak kontekstualisasi fungsi sosial politik dan situasi spesifik budaya yang ditayangkan media massa internasional sehingga menimbulkan efek yang lebih bermakna.

Pada umumnya pemerintah suatu negara menjaga nilai budaya tradisional mereka dengan menggunakan tiga instrumen kebijakan komunikasi yang terdiri tiga rangkaian kebijakan yang saling mengunci. Ketiga kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan informasi, media dan budaya. Kebijakan informasi terkait produksi dan diseminasi informasi publik oleh badan pemerintah, perpustakaan dan jaringan nilai tambah ilmu pengetahuan. Kebijakan media melingkupi

segala bentuk komunikasi bermedia mulai dari bahan cetak sampai cyber space. Kebijakan media juga berkaitan dengan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat di hadapan publik. Kebebasan ini tidak dibatasi kecuali di negara yang memiliki pemerintahan otoriter. Kebijakan budaya tidak hanya menyangkut perawatan nilai-nilai budaya dan identitas budaya saja, melainkan juga merawat warisan sejarah, kebebasan memeluk agama, kewajiban bersekolah dan pengembangan bahasa nasional.

Dengan kebijakan budaya, pemerintah dalam suatu negara terkadang menghadapi dilema sentral mengenai upaya menyeimbangkan keragaman budaya dengan persatuan nasional. Persatuan nasional kerap diganggu oleh keragaman budaya, terlebih dengan masuknya nilai budaya dari luar yang semakin merapuhkan persatuan nasional. Hal yang penting dalam kebijakan budaya adalah bagaimana negara mendefinisikan diri dalam hal identitas budaya nasionalnya serta tujuan dalam tradisi dan nilai-nilainya. Negara yang paling demokratis pun mengklaim persatuan nasional sebagai prioritas tertinggi dan mereka merasa cukup mampu mempertahankan persatuan nasional didorong nilai-nilai demokratis. Tetapi tidak jarang klaim-klaim tersebut hanya lip-service ketika dihadapkan pada masalah keragaman budaya dan arogansi kekuasaan. Seperti negara di Eropa Barat dan Amerika Utara menerima nilai demokratis sebagai nilai yang dibanggakan namun bersikap diskriminatif dalam menerima keragaman budaya. Dengan moto pluribus umum (keragaman untuk persatuan), ternyata paham multibudaya di negara-negara tersebut merasa diserang.

Jatuhnya imperium Uni Soviet menaungi 15 republik dan dihuni oleh 100 suku bangsa tidak mampu mempertahankan hegemoni partai komunis selama 70 tahun, tidak mampu menghancurkan loyalitas etnik budaya dan religius. Sebaliknya, loyalitas budaya lebih mampu mengisi kevakuman budaya yang ditinggalkan oleh delegitimasi ideologi komunis. Akibatnya, muncul sentimen sejarah nasional di masing-masing republik yang merdeka, memiliki identitas dan tujuan dalam

tradisi budaya. Percantuman nama keluarga juga kembali dibanggakan untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak tergarap oleh politik ideologi komunis.

Mitos dan kenangan sejarah secara kuat membentuk konfigurasi budaya masyarakat dan dipelihara dalam monumen nasional, perpustakaan, ritual agama, dan sastra. Dilihat dari prespektif ini keputusan kebijakan budaya seharusnya didasarkan pada memori atau warisan sejarah untuk menentukan nilai-nilai yang perlu ditekan, dibuang dan dipelihara.

Negara-negara berkembang sekitar 20 tahun yang lalu bangkit untuk membangun tatanan komunikasi internasional yang tidak seimbang. Untuk dapat mengakhiri status marjinal dalam hubungan internasional, ketidakseimbangan kini mulai diupayakan untuk berubah keseimbangan ketika komunikasi internasional memasuki era konvergensi informasi dan komunikasi. Hal tersebut ditempuh dengan memanfaatkan perkembangan yang telah maju dalam telekomunikasi dan komputer yang telah merevolusi pertukaran informasi internasional.

Manifestasi yang nyata dalam komunikasi multikulturalisme adalah ketika peristiwa dunia diliput media dan disiarkan ke berbagai negara lain. Selain wilayah politik, jurnalisme komunikasi internasional bekerja di wilayah ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan sifat informasi yang tersirkulasi serta memiliki dampak luas, seperti berita musik, olahraga, film dan program televisi yang mendunia. Begitu juga dalam siaran media karya intelektual serta pertukaran dan kerja sama ilmiah bahkan kegiatan intelijen seperti spionase internasional dan laporan-laporan diplomatik dapat tersiar ke luar negeri.

Studi komunikasi internasional menaruh perhatian mendalam terhadap sirkulasi berita antara negara-negara yang berbeda secara sosial, ekonomi dan budaya. Hal itu menampakkan ketidakseimbangan antara arus berita dari negara maju ke negara berkembang. Dalam dinamika ini kekuasaan organisasi media seperti konglomerasi agen berita turut memengaruhi segala bidang kehidupan sehingga memunculkan imperialisme media dan budaya.

Tak dapat dipungkiri peran politik kerja sama internasional dimanfaatkan untuk memajukan industri media dan masyarakat negara berkembang, seperti yang ditampakkan dalam komunikasi pembangunan. Namun kemajuan itu masih menampilkan kesenjangan. Para ahli pada bidang komunikasi internasional berpendapat bahwa prespektif komunikasi internasional selayaknya menaruh perhatian pada ketidakseimbangan arus berita dan informasi dengan segala konsekuensi serta implikasi yang ditimbulkan, terutama dalam isu politik, ekonomi dan budaya.

Filip Pekorino (2006) menaruh perhatian pada studi perubahan politik sebagai dampak dari internet dan jaringan komunikasi pada konsep dan bentuk pemerintahan demokratis. Riset yang dilakukan Pekorino merujuk pada hipotesis yang berkaitan dengan dampak internet dan jaringan komunikasi yang melibatkan berbagai macam aspek kemajuan teknologi media digital untuk kepentingan publik.

Melalui risetnya, Pekorino memberikan hipotesis: (1) Pemanfaatan internet dan jaringan komunikasi secara langsung memberi dampak terhadap proses demokrasi dengan memengaruhi partisipasi dalam proses politik, terutama dalam pemberian suara; (2) Pemanfaatan internet dan jaringan komunikasi memungkinkan masyarakat pemberi suara terinformasi secara lebih baik; (3) Penggunaan internet dan jaringan komunikasi televisi, radio, dan media cetak tradisional menjadi sumber informasi primer selama proses pemilu secara langsung memberi dampak terhadap keputusan pemilih.

Perlu memainkan peran penting dalam melayani informasi, belum dapat dibuktikan bahwa internet menyajikan informasi ilmiah akademik secara memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berarti karya akademik dan laporan ilmiah termasuk buku belum terusik oleh internet secara serius, kecuali informasi yang sudah diubah menjadi produk digital.

Bawa dengan proliferasi fungsi jaringan internet sebagai media massa yang terdistribusi secara sentral seperti sistem siaran yang terkontrol oleh penjaga, masih terbuka

kemungkinan bagi media tradisional untuk tetap bertahan terutama untuk melayani kebutuhan informasi yang spesifik di masa mendatang.

Berdasarkan fenomena komunikasi internasional melibatkan komunikasi massa dan media internet akhir-akhir ini, dapat disimpulkan bahwa internet dan jaringan komunikasi sosial telah melampui bentuk saluran media massa lainnya yang menjadi sumber informasi primer, berarti arus internet semakin kuat dan beragam informasi mengalir serta melimpah di internet, Bolier David (1996).

Kesimpulan

Kebijakan tata informasi diperlukan untuk mengatur kebebasan informasi dan hak-hak privasi dengan keamanan nasional merupakan hal yang tak mudah diselesaikan. Seperti yang pernah terjadi, oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Agency-NSA) pada masa rezim Bill Clinton pernah merancang dan memperkenalkan teknik enkripsi baru yang populer dikenal sebagai clipper chip untuk digunakan bagi kepentingan keamanan. Dengan clipper chip, NSA diam-diam dapat menyadap informasi yang berpotensi membahayakan keamanan dari luar yang masuk ke lingkungan warga.

Dalam ketiadaan bukti-bukti persuasif dalam menangkal dampak ganda (multi-effects) yang ditimbulkan komunikasi multikulturalisme, kalangan sejarah serta pakar sosiologi kebudayaan dan antropologi budaya mengkhawatirkan dunia akan mengalami berakhirnya peradaban, sejarah, jurnalistik, dan dunia pendidikan. Mereka juga mengkhawatirkan berakhirnya modernitas dengan munculnya masyarakat informasi di desa global (global village) dengan demokrasi elektronik yang membuka peluang bagi pekerjaannya dominasi budaya yang akan memenuhi dunia dengan didukung imperialism budaya.

Pemerintah yang seharusnya membuat kebijakan publik yang inspiratif sesuai harapan masyarakatnya, kerap tunduk terhadap tekanan asing. Lembaga swadaya masyarakat yang

seharusnya memfasilitasi bekerjanya gerakan pemberdayaan masyarakat, malah bersedia menjadi kaki tangan pihak asing. Dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi yang berkedok. Alih-alih untuk membela kepentingan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat menjalankan agenda dan kepentingan asing. Institusi dunia usaha yang seharusnya bergerak dalam proses ekonomi, masuk dalam dunia politik, terutama pada proses pemilihan umum dan legislasi.

Mereka seharusnya menjunjung nilai budaya namun mempraktikan perilaku yang tak selaras dan bahkan membalikkan nilai-nilai budaya yang dihargai masyarakat. Apalagi, korporasi asing multinasional dan transasional sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, kecuali mengeruk keuntungan sebesarnya bagi kepentingan pihaknya sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa hubungan yang seharusnya dijalin melalui komunikasi multikulturalisme yang positif konstruktif namun dijalani dengan membawa dampah negatif-destruktif.

Daftar Pustaka

- David, Bolier. (1996). *Reinventing Democratic Culture in an Art Electronic Network*. New York: Basic Books.
- Livingston, Steven dan Eachus, Todd. (1995). Humanitarian Crises and U.S Foreign Policy: Somalia and the CCN Effect

- Reconsidered, *Political Communication*. Vol. 12.
- Matsuda, Mari J. et al. (1993). *Words that Wound: Critical Race Theory*. Assaultive Speech, and the First Amendment. London, New York: Boulder Company, Westview Press.
- Mowlana, Hamid. (1992). *Triumph of The Image: A Global Perspective on Media's Intervention in the Gulf War*. London, New York: Boulder Company, Westview Press.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shoelhi, Mohammad. (2015). *Komunikasi Lintas Budaya dalam Dinamika Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Tehranian, Majid & Katharine. (1992). *Restructuring for Word Peace: On the Threshold of the 21st Century*. Cresskill, New Jersey: Hampton Press.
- Tehranian, Majid. (1993). *Islamic Fundamentalism in Iran and the Discourse of Development*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tubbs, Stewart L. & Moss, Sylvia. (1974). *Human Communication: An Interpersonal Perspective*. New York: Random House